

Kekuatan *Local Strongman* dalam Pilkada Sampang 2012

Nur Holifah

Abstrak

Pemilihan kepala daerah merupakan ajang yang paling ditunggu-tunggu oleh kalangan para elit informal. Dalam hal ini adalah para blater yang terlibat dalam segala proses pilkada yang berlangsung di Kabupaten Sampang pada tahun 2012. Pada Pilkada Sampang pada tahun 2012 kemarin masih terdapat banyak fenomena-fenomena keterlibatan kekuatan *local strongman* atau orang kuat lokal (blater) dalam strategi kemenangan kandidat. Kemenangan dari pasangan Fannan-Fadhilah pada waktu Pilkada Sampang tahun 2012 banyak dipengaruhi oleh keterlibatan sosok blater atau orang kuat lokal yang menjadi kekuatan dibelakangnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori *Local Strongman* Joel S. Migdal dan *Local bossisme* John T. Sidel untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau literature review dengan menguraikan teori, temuan dan bahan penelitian lainnya yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan penelitian menyusun kerangka pemikiran. Temuan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan dan peran blater dalam perpolitikan di Madura sangat berpengaruh sekali terutama di Kabupaten Sampang. Kemenangan pasangan calon bupati Fannan-Fadhilah pada pilkada Sampang 2012 tidak lepas dari keterlibatan orang kuat lokal (blater) di daerah kekuasaannya masing-masing yang mampu memengaruhi suara masyarakat agar memilih calon bupati sesuai dengan arahan para blater.

Kata Kunci: Pilkada, Local Strongman, Blater, Sampang.

A. LATAR BELAKANG

Pilkada merupakan salah satu bentuk demokrasi di Indonesia. Munculnya demokrasi sebagai sistem politik diharapkan mampu menciptakan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara yang terbebas dari segala bentuk dominasi. Demokrasi telah memberikan kesempatan bagi masyarakat dan pemimpin untuk meningkatkan aktualisasi dalam pemerintahan. Berbagai pendapat mengungkapkan bahwa demokrasi dapat membebaskan masyarakat dari kemiskinan, karena mereka dapat menyampaikan secara langsung berbagai persoalan yang dialami di daerah selama ini.¹

Kekerasan dan religiusitas selalu dekat dengan citra simbolik orang Madura.² Pada umumnya antara kekerasan dan religiusitas memiliki makna yang berlawanan. Eksistensi antara kekerasan dan religiusitas selalu beririsan dengan relasi kuasa dan kepentingan antar aktor di dalam struktur sosial masyarakat.³ Bila melihat konteks, kekerasan selalu memiliki banyak ragam. Seperti halnya, tradisi carok di dalam masyarakat Madura sebagai upaya penyelesaian masalah dengan kekerasan. Kultur ini yang membuat dalam tindakan politik masyarakat Madura sering kali masih menggunakan cara kekerasan untuk mendapatkan dukungan. Hal ini pernah beberapa kali terjadi di waktu pelaksanaan pilkada di Kabupaten Sampang. Penyelesaian masalah dengan cara kekerasan dianalisis juga dapat digunakan untuk memaksakan kehendak. Tradisi seperti ini dianggap sebagai jiwa-jiwa blater dalam istilah masyarakat Madura.

Banyak kasus yang terjadi di masyarakat Madura, yaitu seseorang yang sebelumnya dipandang bukan sebagai golongan blater, disebut sebagai blater oleh warga lainnya karena berani melakukan kekerasan. Blater adalah sosok orang kuat lokal di Madura, baik secara fisik maupun magis dan biasanya dikenal memiliki ilmu

¹ Larry Diamond. *Konsolidasi Demokrasi*. Yogyakarta. Ire Press. 2010.

² Abdur Rozaki. *Social origin dan Politik Kuasa Blater di Madura*. Kyoto Review of Southeast Asia Issue. 2009.

³ Michel Foucault. *Power/Knowledge*. (diterjemahkan oleh Yudi Santosa). Yogyakarta: Bentang. 2012.

kebal, pencak silat atau ilmu bela diri.⁴ Historitas atau fenomena sejarah blater dalam banyak hal seringkali merujuk kepada sosok jagoan sebagai orang kuat di masyarakat pedesaan. Hal ini yang kemudian memunculkan istilah *local strongman* dalam lingkungan masyarakat. Peran *Local strongman* muncul ketika momen pilkada terjadi di setiap bagian daerah di Madura. Peran *local strongman* sendiri dianggap mampu memperbanyak dukungan massa bagi calon kandidat pilkada. Begitulah antara lain reproduksi kultural blater di masa kini. Dinamika yang berlangsung menciptakan kultur dan komunitas tersendiri di dalam masyarakat Madura. Tidak diherankan lagi jika seseorang sudah memiliki identitas dan status sosial sebagai *local strongman* atau blater eksistensinya memiliki posisi sosial tertentu di dalam masyarakat Madura. Sosok *local strongman* atau blater selalu disegani, dihormati dan ditakuti secara sosial oleh masyarakat. Hingga sangat jarang ditemukan seseorang yang dikategorikan sebagai blater dianggap rendah.

Dari sudut pandang sosial, *local strongman* dapat muncul dari strata dan kelompok sosial manapun di dalam masyarakat. Biasanya di beberapa daerah *local strongman* diyakini memiliki kekayaan diantara masyarakat lainnya, sehingga ia seringkali memberikan bantuan, sumbangan kepada masyarakat serta memberikan rasa aman. Hal itulah yang membuat masyarakat secara tidak langsung harus patuh kepada *local strongman*. Sosok *local strongman* atau blater dikenal memiliki karakter yang kuat, pemberani dan luwes dalam pergaulan sehingga memiliki pengaruh di dalam masyarakat. Eksistensinya komunitas blater atau *local strongman* sangat berkaitan pula dengan lemahnya institusionalisasi dan penegakan hukum secara adil di masyarakat. Bertemunya realitas sosio-kultural masyarakat dengan struktur kekuasaan negara yang saling mengakomodasi unsur-unsur premanisme membuat intensitas blater memiliki elastisitas, kelenturan sehingga dapat hadir di berbagai posisi kulutral dan struktural.⁵

Pilkada Sampang tahun 2012 masih menyisakan fenomena-fenomena kekuatan *local strongman* dalam strategi kemenangan kandidat. Dari 14 kecamatan

⁴ Abdur Rozaki. Op. Cit. 3.

⁵ Ibid. hlm. 7.

di Sampang, pasangan Fannan-Fadhilah menguasai suara di delapan kecamatan, yakni Kecamatan Kota, Ketapang, Sokobanah, Jrengik, Torjun, Pangarengan, Banyuates, Tambelangan dan Kecamatan Karang Penang dengan jumlah perolehan sebesar 163.483 atau sebesar 31,44 persen. Jaringan-jaringan kekuasaan yang dimiliki *local strongman* yang terjadi di Sampang mampu mengintimidasi dan mempengaruhi suara-suara masyarakat untuk dapat mendukung kandidat. Diketahui bahwa dalam setiap daerah pemilihan kemenangan pasangan calon Fannan-Fadhilah bekerjasama dan membentuk suatu jaringan *local strongman* untuk dapat memenangkan pilkada 2012. Hal ini terbukti berbagai upaya yang dilakukan oleh *local strongman* dalam lingkungan masyarakat, salah satunya adalah dengan cara memberikan bantuan dan sumbangan misalnya seperti bantuan bahan pangan atau sembako. Hal ini yang membuat masyarakat semakin patuh akan perintah-perintah *local strongman*. Komunikasi yang dibangun oleh Fannan-Fadhilah telah mampu mengalahkan kandidat lainnya, bahkan mengalahkan pasangan *incumbent*. Kekuatan yang dimiliki *local strongman* pada pilkada 2012 nampak jelas terlihat pada Kecamatan Ketapang. Hal ini disebabkan karena peran *local strongman* yang bernama HS di Kecamatan Ketapang merupakan seseorang yang dipandang memiliki nilai material, kekayaan, kekuasaan dan keberanian paling kuat di kalangan masyarakat. Dan HS ini merupakan blater paling terkuat di Kecamatan Ketapang dan seluruh Kabupaten Sampang.

Studi ini berupaya untuk mengemukakan kekuatan-kekuatan *local strongman* atau blater yang ada di Kabupaten Sampang. Dimana pada tahun 2012 Kabupaten ini sedang melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati. Oleh karena itu artikel ini memiliki dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana peran *local strongman* atau blater dalam tradisi dan masyarakat Madura. Kedua, Bagaimana Kekuatan *local strongman* yang termanifestasi ke dalam kontestasi Pilkada Sampang tahun 2012.

B. KERANGKA TEORI

Orang Kuat Lokal (*local strongman*)

Kajian atau pemahaman mengenai eksistensi orang kuat merupakan konsekuensi langsung dari kajian tentang elit penguasa. Terutama tentang elit yang tidak memerintah langsung atau berkuasa di dalam struktur organisasi formal. Menurut Putnam, orang kuat adalah mereka yang tidak berada di posisi puncak sebuah struktur organisasi namun memiliki pengaruh dan kekuasaan penuh untuk menentukan atau memutuskan ketentuan yang berlaku dalam sebuah organisasi. Karena pengaruh kekuasaan serta reputasi yang dimiliki olehnya, orang kuat dapat memerintah dan mengarahkan elit yang berkuasa dalam hal ini adalah elit formal agar mengikuti semua hal yang sesuai dengan keputusan dan ketentuan orang kuat tersebut.

Joel S. Migdal mencoba menjelaskannya dengan membawa kita pada pemahaman bahwa Negara adalah bagian yang terintegrasi dengan masyarakat. Sifat yang dimiliki Negara tidak terlepas dari basis sifat masyarakat di dalamnya.⁶ Migdal mendefinisikan Negara sebagai organisasi besar yang hidup berdampingan dengan organisasi-organisasi lainnya diluar dirinya, yakni seperti organisasi-organisasi sosial formal dan informal.⁷ Eksistensi organisasi-organisasi informal di luar Negara pada akhirnya menimbulkan berbagai persoalan yang dapat megurangi kapabilitas sebuah Negara sebagai satu-satunya alat pengontrol yang sah.

Berbagai macam organisasi informal di luar Negara seperti etnisitas, golongan bahkan kelompok-kelompok semacam sekte agama adalah macam-macam kekuatan yang bisa saja mengganggu bahkan menghalang-halangi jalannya berbagai macam aturan serta rambu-rambu pembangunan yang telah ditetapkan oleh Negara. Hal ini banyak ditemukan pada kasus di Negara-negara dunia ketiga. Di Negara-negara yang baru merdeka, modernisasi atauran hukum bisa jadi masih bertolak belakang dengan aturan-aturan tradisional yang secara kultur masih kuat tertanam dalam kehidupan

⁶ Joel S. Migdal. *State in Society: Studying How States and Societies Transform and Constitute One Another* (Cambridge, UK: The Press Syndicate of the University of Cambridge). hlm. 59.

⁷ *Ibid.*, 63.

masyarakat. Hal ini lebih diperparah lagi dengan kompetensi antar kelompok kepentingan diantara mereka untuk mengambil alih kekuasaan yang diwariskan pasca bangsa penjajah hengkang. Maka akan terlihat maklum bila kondisi di Negara dunia ketiga terbilang lemah. Sebab infrastruktur Negara baik yang berupa sumber daya manusia maupun fundamentalisme hukum, masih dalam tahap perkembangan sehingga kontrol sosial sangat sulit di implementasikan.

Analisis Migdal, berdasarkan pada kondisi dan realitas politik seperti munculnya kelompok-kelompok atau institusi informal di luar Negara yang mengurangi efektivitas dan kapabilitas Negara, di beberapa Negara dunia ketiga menunjukkan bahwa, kelemahan-kelemahan Negara dunia ketiga telah melahirkan orang-orang kuat di tingkat lokal. Joel S. Migdal menyebut orang kuat lokal dengan sebutan *local strongman*. Orang kuat lokal secara konsep jelasnya di definisikan sebagai kekuatan informal baik yang berupa tuan tanah, tengkulak, pengusaha, kepala suku, panglima perang, bos petani kaya, pemimpin golongan dan lain sebagainya, yang berusaha memonopoli kontrol atas masyarakat dalam cakupan wilayah tertentu lewat kerjasama jejaring yang mereka bangun.⁸

Local strongman merupakan konsekuensi langsung dari posisi Negara yang melemah, yaitu ketika fungsi kontrol dan mengatur sebuah Negara semakin lemah (*weak state*). Pada saat yang bersamaan, masyarakat dengan segala *social capacity* yang dimiliki semakin kuat. Mereka berhasil keluar dari dominasi sebuah Negara, artinya masyarakat disini menjadi relatif lebih otonom di hadapan Negara.

Otonomi yang dimiliki masyarakat diatur dan dikordinasi oleh para pemimpin lokal yang ada. Pemimpin lokal inilah yang pada akhirnya menjadi kekuatan penentu. Para pemimpin lokal ini pula yang menjadi *local strongman*.⁹ Lebih lanjut, Migdal menjelaskan bahwa kunci kesuksesan *local strongman* bukan terletak pada kekuasaan formal atau resmi yang diciptakan. Namun pada pengaruh yang dimiliki.

⁸ Melvin Perjuangan Hutabarat. "Fenomena 'Orang Kuat Lokal' Di Indonesia Era Desentralisasi Studi Kasus Tentang Dinamika Kekuasaan Zulkifri Nurdin Di Jambi." Tesis S2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Indonesia. 2012. hlm. 17.

⁹ Joel S. Migdal. Op. Cit. 254.

Meskipun eksistensi *local strongman* lebih banyak ditentukan oleh tingkat besarnya pengaruh yang dimiliki, namun eksistensi mereka juga sangat ditentukan oleh dukungan struktur Negara. Migdal menyebutnya sebagai *triangle of accommodation*. Dominasi *local strongman* akan kurang maksimal ketika Negara tidak memberikan dukungan penuh pada mereka. Oleh karena itu, eksistensi mereka juga sangat tergantung atas kelihaihan *local strongman* ini untuk mendapatkan dukungan Negara. Kolaborasi *local strongman* dan Negara ini yang mendasari kuatnya pengaruh *local strongman* dalam masyarakat lokal. Untuk kepentingan Negara, Negara rela memberikan fasilitas sekaligus mengontrol para *local strongman*.¹⁰

Dalam tulisan Migdal, *strongman* yang berkembang di lokal dapat digambarkan sebagai jaringan sosial yang menyebar di daerah otonom, dimana kontrol masyarakat secara efektif telah terpecah. Kedua, *local strongman* menjalankan kontrol sosialnya dengan menjalankan berbagai strategi untuk ‘bertahan hidup’ dalam lingkaran politik di masyarakat. Demikian dapat dikatakan bahwa argument midgal lebih cenderung menempatkan ‘personalism’ dan ‘clientelism’ dalam hubungan patronase politik.

Jadi secara ringkas, keberhasilan *local strongman* atau orang kuat lokal dalam mencapai distribusi dan pengakuan kontrol sosial mereka di masyarakat menurut Migdal, didasari atas tiga faktor utama. Pertama, karena sifat masyarakat yang berbentuk jejaring, dimana klientilisme tumbuh subur dan berkembang. Sehingga kontrol sosial terfragmentasi pada kekuatan-kekuatan yang ada, karena tidak mampu dimonopoli oleh Negara. Kedua, karena proses akulturasi mitos “strategi bertahan hidup” yang ada dalam diri orang kuat lokal di masyarakat, dan sudah menjadi simbol tersendiri di antara mereka. Di mana orang kuat menjadi satu-satunya tumpuan hidup masyarakat. Dan ketiga, kemampuan orang kuat lokal mengintervensi, menembus dan menangkap lembaga-lembaga Negara sehingga menjadikan Negara menjadi

¹⁰ Ibid., 256-257.

lemah, yakni melalui semacam gangguan lewat berbagai tindakan koersif yang ditujukan pada birokrat-birokrat pemerintah.¹¹

Bos Lokal (*local bossisme*)

Pandangan Migdal tentang *local strongman* dielaborasi lebih luas oleh John T. Sidel, dengan menariknya ke dalam bingkai politik di Filipina, Thailand dan Indonesia. Karena itu, dirasa penting dalam kerangka teori ini juga membahas mengenai pemikiran Sidel orang kuat lokal dalam dalam realitas politik di masyarakat Filipina. Sidel justru menemukan fenomena yang berbeda dengan Migdal, terutama tentang pengaruh dan posisi sebuah Negara. Jika Migdal mengasumsikan keberadaan *local strongman* sebagai akibat dari Negara yang melemah (*strong societies and weak state*), maka Sidel memiliki asumsi yang sebaliknya, bahwa orang kuat lokal adalah cerminan tentang kuatnya Negara dalam melakukan kontrol terhadap masyarakat.

Sidel menyebut teorinya dengan istilah *local bossisme*/bos lokal atau *bossisme*/teori bossisme. Sebagaimana yang diakui oleh John T. Sidel sendiri, teori ini merupakan kerangka analisis alternatif guna menjelaskan fenomena orang kuat lokal akan kondisi yang lebih akurat serta komperhensif saat dihadapkan pada kasus-kasus Negara dunia ketiga di Asia Tenggara. Teori ini merupakan pemutar balikan fakta atas temuan-temuan Migdal di Negara dunia ketiga atau sebagai pelengkap dari kelemahan teori yang telah ada. Bila dalam perspektif Migdal kemunculan orang kuat lokal diproduksi di luar Negara dan penyebab Negara menjadi lemah, Sidel berpendapat sebaliknya, bahwa bos lokal merupakan hasil dari perkawinan silang Negara dengan sistem pasar. Artinya, Negara setidaknya memiliki peran dalam mereproduksi, mengandung, serta melahirkan para bos lokal dalam dimensi kehidupan sosial mereka. Sehingga argumen Migdal yang menyatakan bahwa orang kuat lokal hanyalah penghambat sistem kapital dan arus modal, terbantahkan sama sekali. Faktanya, orang kuat lokal dengan globalisasi dan arus modal internasional, mampu beradaptasi bahkan meraup keuntungan dengan ikut serta menjadi salah satu agen pemain di dalam sistem pasar tersebut. Mereka melihat berbagai proyek

¹¹ John T. Sidel. "*Bosisme dan Demokrasi di Filiphina, Thailand, dan Indonesia.*" dalam John Harris, Kristian Stokke dan Olle Tornquist. Ed., *politisasi Demokrasi Politik Lokal Baru*. Jakarta: Demos. 2005. hlm. 72-73.

pembangunan di Negara-negara dunia ketiga sebagai peluang untuk memperkaya diri dan menjaga jejaring mereka (melalui pemberian insentif), dengan menguasai segala bentuk sumber daya ekonomi yang banyak dicairkan oleh negara.

Menurut Sidel, *local bossisme* merupakan mereka yang berperan sebagai *predatory broker politics* disebuah daerah territorial tertentu. Mereka adalah para calon kekuasaan yang memiliki monopoli kontrol terhadap sumber daya kekerasan dan ekonomi dalam satu wilayah. Pola kerja *local bossism*, sebagaimana penjelasan Sidel, senantiasa di bawah kordinasi dan komando Negara, mereka beroperasi di bawah bayang-bayang kepentingan rezim lokal melalui peraturan antar elit lokal, seperti birokrat, militer, bos-bos partai, pengusaha preman dan agamawan.

Adapun kasus bossisme yang terjadi di Thailand, hampir sama beriringan dengan terjadinya reformasi birokrasi dan sistem modal yang marak mewarnai Negara tersebut pada era 1970-an. Reformasi yang dimaksud adalah transformasi birokrasi yang menggabungkan dua kekuatan inti birokrasi sekaligus, yakni militer dan sipil.¹² Masalah yang muncul sewaktu digulirkannya reformasi birokratik adalah persoalan kelembagaan yang masih kurang siap menghadapi perubahan yang disertai ekonomi pasar yang lebih terbuka. “Korupsi Pasar,” sebagaimana yang dikatatakan oleh James C. Scott menggejala dengan para agen lokal yang perlahan-lahan mulai mengakumulasi modal dari sistem kapitalisme. Gejolak bossisme semakin melaju ketika pada tahun 1980-1990 para bos lokal atau para *chao po* ikut serta dan menguasai setengah mayoritas jumlah anggota parlemen. Kendatipun kekuasaan militer masih dominan.¹³ Ketenaran para *chao po* juga meningkat karena dengan kekuasaan yang mereka miliki, mereka bukan hanya berlaga sebagai broker ekonomi yang menguasai pasar, tetapi mereka juga bertindak sebagai broker politik yang seringkali mengirim para pemilih untuk patron mereka di tingkat kota, provinsi, pusat atau untuk diri mereka sendiri. Hal ini mereka lakukan melalui tindakan-tindakan koersif, manipulasi dan pembelian suara.¹⁴

¹² Ghifary, Zikry Auliya, “Local Bossism: Indonesia dan Thailand dalam Perspektif Komparatif,” artikel diakses pada 26 Februari 2018. <https://www.academia.edu/2612170/>.

¹³ John T. Sidel. Op. Cit. 81-83.

¹⁴ Ibid. hlm. 83.

Perbedaan antara bossisme di Filipina dan Thailand menurut Sidel, terletak pada dua hal. Pertama transisi pelimpahan wewenang kontrol sosial untuk kasus Thailand dari pusat ke daerah yang berbarengan dengan pertumbuhan kapitalisme cenderung dibalut melalui koalisi sistem multipartai yang disebarkan jaringan patronase antar mereka.¹⁵

Lain halnya dengan Filipina dan Thailand, format *local bossisme* di Indonesia lebih longgar dan tidak seketat dengan fenomena bossisme di dua Negara tersebut. Pertama, karena Indonesia selama kurun waktu 1966-1998 dijalankan dengan skema pemerintahan otoritarianisme, dimana kekuatan di luar Negara diberangus. Diksresi dan segala keputusan apapun hanya berdasarkan instruksi pusat termasuk di dalamnya penempatan dan rotasi pimpinan wilayah (walikota/bupati/gubernur). Wakil-wakil rakyat di parlemen, menteri, panglima TNI, dan ketua-ketua organisasi maupun partai politik.

Celah masuknya kekuatan informal untuk mendikte kontrol sosial hampir tidak terlihat sama sekali. Soeharto menjadi satu-satunya momok dengan kekuatan dan kekuasaan terbesar yang tersebar di berbagai pelosok wilayah Negara. Kedua, pasca Soeharto rampung dari jabatannya dan desentralisasi diterapkan dalam arti yang sebenar-benarnya, sekalipun kesempatan para elit lokal terdahulu memiliki peluang yang lebih besar untuk tetap atau memperluas kuasanya ketimbang di waktu Soeharto berkuasa, tetap saja mereka harus berlomba dan bersaing dengan kekuatan lainnya di parlemen yang juga memiliki kuasa untuk merancang konstitusi. Sebagaimana dikatakan oleh Sidel, mereka tetap “dirintangi oleh kendala-kendala institusional”.¹⁶

Akan tetapi hal ini tidaklah semata-mata penghambat laju ambisi para bos, sebab sistem pemilihan secara langsung pada saat berlangsungnya pilkada menurut Sidel bisa jadi merupakan jalan alternatif menuju pencapaian *local bossisme* dalam membangun, memperluas, menjaga dan memelihara kuasa mereka di aras lokal.¹⁷

¹⁵ Ibid. hlm. 84.

¹⁶ Ibid. hlm. 99.

¹⁷ Ibid. hlm. 99.

Dengan pilkada langsung, mereka dapat memobilisasi rakyat dengan beragam cara: intimidasi, suap, dan pengucilan. Inilah yang masih menjadi kelemahan sistem demokrasi di Negara dunia ketiga. Demokrasi masih dipahami sebagai ajang prosedural semata dan tidak substansial. Sehingga kebebasan partisipatif rentan memuat praktek-praktek amoral yang berseberangan dengan nilai-nilai humanisme dan emansipatoris warga. Kekerasan dan praktek uang masih menjadi gejala umum praktek demokrasi di Indonesia dan Negara dunia ketiga umumnya.¹⁸

C. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan studi kepustakaan atau literature review dengan menguraikan teori, temuan dan bahan penelitian lainnya yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan penelitian menyusun kerangka pemikiran. Literature review adalah serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang obyek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan.¹⁹ Penulis juga menggunakan hasil riset terdahulu, buku dan informasi lainnya sebagai bahan untuk membangun argumen. Fokus dari studi ini adalah menemukan berbagai teori atau gagasan yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan rumusan masalah. Adapun sifat dari studi ini adalah penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca.

D. HASIL TEMUAN

1. Blater dalam Kekuasaan Orang Kuat Lokal di Madura

Keberadaan blater sebagai kekuatan elit informal di Madura, kerap kali menjadi simbol yang dalam bahasa Joel S. Migdal disebut sebagai “*Strategi of Survival*”.²⁰ Simbol seperti ini kelak mengantarkan blater ke tempat istimewa di

¹⁸ Ibid. hlm. 73.

¹⁹ Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. PT. Remaja Rosdakarya : Bandung. hlm. 52.

²⁰ *Strategi of Survival* merupakan strategi bertahan hidup dengan mendekati diri kepada kekuatan patron, yang dalam ha ini adalah para jago yang berkuasa pada teritori tertentu. Daniel Lambach. “State in Society: Jole S. Migdal and the limit of state authority.” Paper for presentation at the conference “Political Concepts the Nation State: Cosmopolitanism, territorialit, democracy.” Danish Political Theory Network Conference, University of Copenhage, Departement of Political Science Copenhage, 27-30 October 2004.

antara kalangan orang kuat lokal, orang-orang berpengaruh dan terhormat. Kehadiran para blater diantara masyarakat Madura, jika dilihat kembali ke sejarah masa lalu, sangat begitu besar impresinya. Mereka bukan hanya tinggal dan menetap sebagaimana masyarakat biasa, bahkan lebih dari itu, keberadaan mereka ditujukan pula untuk turut serta dalam membina dan mengintervensi masyarakat di berbagai aspek kehidupan: baik aspek budaya, agama, sosial maupun politik. Keterlibatan ini telah membentuk ikatan emosi yang kuat, yang mengikis batas impersonal masyarakat dengan kelompok-kelompok informal.

Munculnya blater sebagai orang kuat lokal/bos lokal, tidak bisa terlepas dari faktor ekologi tegalan yang tidak mampu memberikan pasokan kebutuhan secara maksimal, sehingga keadaan masyarakat menjadi serba kekurangan.²¹ Madura yang pada umumnya sangat didominasi oleh ekologi tegal sebagai dampak dari iklim yang sangat kering dan dengan curah hujan yang sangat begitu minim, sehingga pada akhirnya memberikan dampak lain pada kehidupan becocok tanam masyarakat Madura. Kondisi ekologi Madura yang seperti ini pada akhirnya mau tidak mau juga akan banyak mempengaruhi pada konsepsi pemukiman penduduk di sekitarnya. Masyarakat Madura memiliki model pemukiman yang sangat unik, yakni pemukiman masyarakat Madura lebih terpisah dari pada jenis pemukiman di pulau Jawa yang sangat rapat dan terintegrasi di satu desa atau komplek.²² Maka dari itu hidup masyarakat Jawa cenderung berkelompok, karena sistem tani yang menjadi ciri khas masyarakat Jawa, teknis irigasi perlu diatur sesuai dan biasanya terjadi atas asas gotong-royong. Dengan begitu, wajar bila solidaritas yang dibangun antara masyarakat Jawa terbentuk dalam kerangka ekonomi.

Dengan model atau corak ekologi tegalan dan pemukiman penduduk yang terpisah yang sangat dominan pada masyarakat Madura, dan akhirnya berpengaruh juga pada minimnya solidaritas antar mereka, dan itu tergambarkan

²¹ Abdur Rozaki. "Social Origin dan Politik Kuasa Blater di Madura." *Kyoto Review of Southeast Asia Issue* 11 (Desember 2009).

²² Kuntowijoyo. *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940*. Jogjakarta: Mata Bangsa. 2002. hlm. 60.

melalui sikap individualistik masyarakat Madura. Masyarakat Madura tidak seberapa terikat dengan rasa tanggung jawab dengan sesama dan antar masyarakat desa sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Jawa dan Sumatra. Tanggung jawab yang dimiliki dan menonjol di dalam kultur Madura lebih bersifat eksklusif antar keluarga saja.²³

Adapun satu-satunya simbol penguat solidaritas atau yang sering disebut oleh Durkheim dengan “jaringan sentimen kolektif” di antara masyarakat Madura adalah melalui ritual-ritual agama atau kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya.²⁴ Dengan menggunakan ritual ibadah dan upacara-upacara keagamaan, gerakan-gerakan masyarakat lainnya secara bersama-sama, perlahan rasa solidaritas ini muncul dan terpujuk ke permukaan sehingga kiai dan blater menjadi insentitas penting dalam simbol solidaritas tersebut.²⁵ Walaupun kemunculannya sebagai blater di Madura atau orang kuat lokal/bos lokal juga merupakan buntut dari beragam penindasan yang sering dilakukakan oleh elit semasa raja-raja dulu berkuasa dan semasa penjajahan, serta sebagai dampak dari hadirnya institusi *Barisan* di bawah kendali kolonialisme Hindia-Belanda.²⁶

Buah hasil kerja cocok tanam tegalan yang masyarakat Madura kerjakan, kenyataannya tidak banyak membantu dan memberikan keuntungan bagi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat Madura. Bahkan untuk memenuhi pasokan kebutuhan sehari-hari masyarakat Madura yang serba kekurangan tersebut, masyarakat Madura harus mendatangkan sebagian logistiknya dari Pulau Jawa. Dengan adanya hal tersebut cukup untuk menjadi alasan mengapa akhirnya banyak diantara masyarakat Madura yang lebih memilih hidup dan bermigrasi ke Jawa atau ke daerah-daerah di luar pulau Madura dan beberapa

²³ Mutmainnah. “Kiai dan Dinamika Politik Lokal di Kabupaten Bangkalan dan Sumenep Madura,” dalam Jamil Gunawan, Sutoro Eko Yunanto, anton Birowo dan Bambang Purwanto, es., *Desentralisasi Globalisasi dan Demokrasi Lokal*. Jakarta. LP3ES. 2004. hlm. 215.

²⁴ Kuntowijoyo. Op. Cit. hlm. 450.

²⁵ Mutmainnah. Op. cit. hlm. 216.

²⁶ *Barisan* merupakan satuan korps militer yang beranggotakan para sipil dan digunakan untuk kepentingan Belanda. A. Latief Wiyata. *Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. Yogyakarta. LKIS. 2002. hlm. 68.

tempat lain di Indonesia ketimbang harus menetap di daerah. Atau meskipun masih ada yang menetap, sebagian diantara mereka lebih memilih hidup untuk menjadi bandit-bandit desa (blater).²⁷

Berprofesi sebagai bandit desa atau blater setidaknya telah memberikan jaminan bagi kepastian hidup mereka sehari-hari. Model atau corak hidup blater yang sangat lekat dengan alam kekerasan, menjadikan mereka sebagai aktor atau orang kuat lokal/bos lokal yang paling ditakuti oleh masyarakat di daerah kekuasaannya. Mereka kerap terlibat dalam segala macam tindakan kriminal seperti perampokan, pencurian serta perjudian dan masih banyak tindakan-tindakan kriminal lainnya.²⁸

Sikap atau tindakan seperti itu telah meningkatkan daya tawarnya selaku kelompok penting pada strata sosial di kalangan masyarakat. Namun harus digarisbawahi, bahwa tidak selamanya keberadaan para sosok blater di Madura hanya sebatas diilustrasikan sebagai para bandit atau kriminal lokal. Sebab tak jarang salah satu dari mereka pun turut serta, malah menjadi bagian dari garden atau barisan terdepan masyarakat dalam rangka melawan kolonialisme dan depotisme para raja di zaman dahulu. Dengan sejarah sosial yang berpengaruh di masyarakat Madura, maka tidak aneh bila di kemudian hari, di era-era selanjutnya, para blater atau dalam bahasanya Joel S. Migdal adalah *Local strongman*/orang kuat lokal dan jika dalam bahasanya Jhon T. Sidel adalah *Local Bossism*/bos lokal ini memegang peranan penting, bukan saja dalam konteks kehidupan sosial saja, melainkan juga dalam wacana perpolitikan lokal di Sampang.

2. Blater dan Pilkada Sampang

Blater dan proses perpolitikan di Kabupaten Sampang tidak bisa dipisahkan, terutama ketika ada pilkada pemilihan kepala daerah bupati dan wakil bupati Sampang pada tahun 2012 kemarin. Keterlibatan atau peran blater sangat diperlukan di dalam setiap pilkada di Madura. Karena blater memiliki atau

²⁷ Abdur Rozaki. Op. Cit. hlm. 6.

²⁸ Ibid. Abdur Rozaki. hlm. 8.

mampu mempengaruhi suara massanya agar mengikuti semua aturan dan pilihan yang telah blater buat. Salah satu blater yang terkuat dan paling ditakuti di Kabupaten Sampang yang terlibat dalam proses kemenangan pasangan Fannan-Fadhilah pada pilkada Sampang 2012 adalah bapak HS yang berkuasa di daerah Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang.

Kekuasaan bapak HS sebagai sosok blater atau orang kuat lokal sudah tidak diragukan lagi, kemampuannya dalam memenangkan pasangan calon disetiap pemilihan seperti pemilihan klebun, bupati dan wakil bupati, dan politisi di Kabupaten Sampang sudah menjadi rahasia umum. Bapak HS ini memiliki nama dan kekukuasaan yang cukup besar dan sangat berpengaruh di Kabupaten Sampang terutama di Ketapang Laok, tidak ada yang berani membantah perkataan atau perintah dari bapak HS. Karena jika sekali saja melanggar atau membantah perintah beliau yakni nyawa taruhannya.

Kekejaman dan kekerasan beliau sudah menyebar dipelosok Madura, bapak HS ini selain mempunyai kekuasaan dan kekayaan sehingga menjadikannya sosok yang paling ditakuti, disegani dan menjadi tokoh blater dikalangan masyarakat madura juga karena kemampuannya dalam bidang ilmu spiritual. Dengan kelebihan yang beliau miliki, maka tidak jarang banyak calon pasangan bupati yang meminta bantuannya untuk mendukungnya disaat pilkada di Kabupaten Sampang. Beliau tidak begitu saja memilih calon yang akan didukungnya, beliau menggunakan ilmu spiritualnya untuk mengetahui siapa yang seharusnya beliau dukung agar kemenangan itu bisa terjadi dan hasil dari kemenangan pasangan calon yang beliau dukung yakni, akan berjalan sebuah hubungan kerjasama selanjutnya dengan bupati yang menjabat tersebut.

Hubungan antara blater HS dengan bapak Fannan-Fadhillah sangat dekat, sejak mereka dimenangkan pada saat Pilkada 2012 kemarin, maka tidak jarang blater HS ini sering diikutsertakan dalam setiap acara-acara pemerintahan seperti pembahasan atau pengimpelentasian sebuah kebijakan, itu bisa dikatakan sebagai reward dari bupati dan wakil bupati yang sudah dipilih sebelumnya. Dan

keberhasilan suara yang mereka dapat jumlahnya besar, hal ini menentukan kerjasama yang akan dibangun juga akan bertambah baik dan erat.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Dominasi blater atau *local strongman* telah mampu mengubah demokrasi yang bebas di Indonesia dan di beberapa negara lainnya. Kemenangan pasangan calon dalam kontestasi pilkada seringkali dipengaruhi oleh kuatnya jumlah blater atau *local strongman* di beberapa distrik. Masyarakat sebagai penentu suara kemenangan seakan-akan terbungkam dan terintimidasi oleh keberadaan *local strongman*. Memang jika dapat kita lihat proses kampanye yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon akan lebih mudah meraih suara kemenangan, bekerja sama dengan *local strongman*. Seperti yang diungkapkan oleh Migdal, bahwa munculnya kelompok-kelompok non formal adalah salah satu bukti bahwa melemahnya suatu pemerintahan. Individu-individu yang dianggap *local strongman* dapat dikategorikan sebagai orang yang memiliki nilai material lebih dalam lingkungan masyarakat. Misalnya, sebagai tuan tanah, tengkulak, pengusaha, kepala suku, panglima besar, dan pemimpin suatu kelompok lainnya. Sehingga mereka mampu memonopoli masyarakat dari sektor ekonomi. Dalam analisis Migdal sesuai studi ini *local strongman* melakukan berbagai cara untuk mempertahankan posisinya dengan menempatkan ‘personalism’ dan ‘clientelism yang membentuk jaringan patronase. Dalam studi ini peran *local strongman* akan jelas terlihat dalam aktivitas sosial dan kegiatan pemilu. Seperti argument Sidel, bahwa pola kerja *local bossism*, senantiasa bekerja di bawah komando negara. Dalam hal ini negara adalah calon pasangan yang akan menduduki kursi pemerintahan lokal.

Singkatnya, dalam studi ini menunjukkan bahwa *local strongman* membentuk kekuatannya dengan berbagai cara salah satunya adalah melalui kekerasan, intimidasi dan bahkan sumbangan sosial. Secara tidak langsung kedudukan *local strongman* sangat mempengaruhi proses pilkada pada umumnya. Tidak hanya itu, negara dianggap sebagai suatu wahana dalam terbentunya kekuasaan yang dominasi.

Sehingga nilai-nilai demokrasi yang langsung, bebas, jujur, dan adil sering ditiadakan.

Rekomendasi

Perlu ditekankan kembali bahwa tulisan ini jelas bukan akan menjadi tulisan yang terakhir membahas topik mengenai *local strongman*. Masih banyak data-data yang dianggap yang sangat penting yang belum tercantum dalam tulisan ini. Oleh karena itu peneliti berharap dengan adanya penelitian selanjutnya terkait *local strongman*, dapat menjawab berbagai permasalahan blater atau *local strongman* di berbagai daerah khususnya wilayah Madura. Dalam tulisan ini fokus utama adalah peran *local strongman* dalam kemenangan pilkada.

Tulisan ini juga mendiskusikan bagaimana blater atau *local strongman* mengaplikasikan kekuatannya untuk memperoleh dukungan suara, termasuk eksistensinya dalam pilkada. Sehingga perlu ditindaklanjuti oleh penelitian-penelitian lain atau tulisan ilmiah lain di masa mendatang. Beberapa rekomendasi yang dapat peneliti sampaikan untuk dapat ditulis kembali yaitu bagaimana respon masyarakat terkait keberadaan blater atau *local strongman* dalam lingkaran politik. Serta bagaimana impilkasi demokrasi yang bersimbol kekuasaan dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat jika dalam suatu daerah blater dan *local strongman* yang mendominasi. Harapan yang ingin disampaikan penulis, semoga dalam tulisan ini dan penelitian atau tulisan yang akan mendatang dapat merubah budaya demokrasi yang ada di Indonesia, khususnya di Madura. Karena hal ini sangat berdampak pada kesatuan berbangsa dan bernegara dalam konteks nasionalisme.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Diamond, Larry. 2010. *Konsolidasi Demokrasi*. Yogyakarta. Ire Press.
- Migdal, Joel S.. *State in Society: Studying How States and Societies Transform and Constitute One Another* (Cambridge, UK: The Press Syndicate of the University of Cambridge).
- Sidel, John T. 2005. “*Bosisme dan Demokrasi di Filipina, Thailand, dan Indonesia.*” dalam John Harris, Kristian Stokke dan Olle Tornquist. Ed., *politisasi Demokrasi Politik Lokal Baru*. Jakarta: Demos.
- Syaodih, Nana. *Metode Penelitian Pendidikan*. PT. Remaja Rosdakarya : Bandung
- Kuntowijoyo. 2002. *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940*. Jogjakarta: Mata Bangsa.
- Mutmainnah. 2004. “*Kiai dan Dinamika Politik Lokal di Kabupaten Bangkalan dan Sumenep Madura,*” dalam Gunawan, Jamil; Yunanto, Sutoro Eko ; Birowo, anton dan Purwanto, Bambang, es, *Desentralisasi Globalisasi dan Demokrasi Lokal*. Jakarta. LP3ES.
- Wiyata, A. Latief. 2002. *Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. Yogyakarta. LKIS.

Jurnal:

- Rozaki, Abdur. 2009. *Social origin dan Politik Kuasa Blater di Madura*. Kyoto Review of Southeast Asia Issue.
- Foucault, Michel. 2012 *Power/Knowledge*. (diterjemahkan oleh Yudi Santosa). Yogyakarta: Bentang.
- Melvin Perjuangan Hutabarat. 2012. “*Fenomena ‘Orang Kuat Lokal’ Di Indonesia Era Desentralisasi Studi Kasus Tentang Dinamika Kekuasaan Zulkifri Nurdin Di Jambi.*” Tesis S2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Indonesia.

Internet:

- Ghifary, Zikry Auliya, “Local Bossism: Indonesia dan Thailand dalam Perspektif Komparatif,” artikel diakses pada 26 Februari 2018. <https://www.academia.edu/2612170/>.